



# Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?



Arif Satria  
Eva Anggraini  
Akhmad Solihin

# Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?

# Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?

Arif Satria  
Eva Anggraini  
Akhmad Solihin

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Ketentuan pidana pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

1. Barang siapa sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suara ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Bogor, April 2009

## Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?

Arif Satria  
Eva Anggraini  
Akhmad Solihin

Copyright © 2009

Editor:  
Neisya Solaita, S. TP

Lay Out & Desain Cover:  
Andri Alamsyah

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh PT Penerbit IPB Press  
Kampus IPB Darmaga  
Bogor, 2009

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 978-979-493-180-6

Dicetak oleh Percetakan Glory Offset  
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

## Kata Pengantar

Globalisasi telah memasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat dunia saat ini, dan dalam dunia yang tanpa batas, seluruh aktifitas manusia pun telah diatur mulai dari ekspor - impor hingga pemanfaatan sumberdaya alam. Fenomena ini menunjukkan bahwa saat ini di belahan dunia mana pun hampir tidak ada yang tidak diatur, dengan kata lain tidak ada lagi sumberdaya yang benar-benar bersifat open access. Salah satunya adalah sumberdaya perikanan. Dalam beberapa tahun terakhir, telah dibentuk beberapa *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO) untuk mengatur penangkapan ikan jenis-jenis tertentu ataupun untuk mengatur aktifitas di perairan tertentu. Sebut saja di antaranya CCSBT, IOTC dan WCPFC.

Tidak hanya dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, kegiatan produksi dan perdagangan perikanan pun menjadi objek pengaturan global. Aturan-aturan global ini mengusung sebuah misi untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya perikanan, sehingga produksi dan perdagangan perikanan pun haruslah mengarah pada tujuan tersebut. Tidak heran saat ini di Negara-negara maju bermunculan berbagai bentuk kampanye untuk tidak membeli dan mengkonsumsi ikan-ikan yang ditangkap dengan teknik yang tidak ramah lingkungan. Karena itu globalisasi perikanan pun memberikan pilihan-pilihan sulit bagi Negara-negara yang terlibat. Globalisasi, ternyata belum menguntungkan semua pihak. Dan pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara-negara sedang berkembang (NSB) seperti Indonesia. Karena pada kenyataannya masih sulit bagi NSB untuk dapat memenuhi standar-standar internasional yang telah ditetapkan.



Kata Pengantar

Buku ini merupakan salah satu sumbangan pemikiran kepada publik dalam memahami posisi NSB terutama Indonesia dalam globalisasi perikanan. Kami tidak berpretensi buku ini dapat menjadi solusi terhadap persoalan globalisasi perikanan. Namun, setidaknya buku ini baru sampai pada gambaran kompleksitas globalisasi. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya pemerintah sebagai pengambil kebijakan, para akademisi dan mahasiswa serta praktisi dan lembaga non pemerintah yang *concern* terhadap bidang perikanan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritikan dari semua pihak untuk perbaikan buku ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para narasumber Dr. Purwito Martosubroto (Komisi Tuna Indonesia), Bapak Purnomo (ASTUIN), Dr. Bambang Suboko (Gappindo), Imam Mustofa (WWF), Dr. Suseno, Dr. Hendro, Dr. Saut Hutagalung beserta staf Direktorat Pemasaran Internasional DKP, khususnya Pak Jaya Wijaya, yang telah membantu kami dengan tulus dalam studi ini. Penjelasan-penjelasan dari para narasumber sangat membantu kami dalam memahami peta permasalahan perikanan global saat ini. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan banyak informasi dan data yang sangat berguna dalam penulisan buku ini. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Joko Soesilo Antoro yang telah memperkaya bahasan buku ini dengan kasus-kasus perdagangan perikanan serta M. Ramli Ayubar, M.Si atas informasi dan data yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih yang sangat mendalam kami sampaikan kepada Institute for Global Justice (IGJ) yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada kami untuk melakukan studi kecil ini serta menuangkannya dalam sebuah buku. Rasa terima kasih ini terutama sekali

kami sampaikan kepada Mas Bonny Setiawan, Mbak Ponny Anggoro, Mbak Indah serta seluruh staf IGJ yang telah menjadi mitra kami dalam melaksanakan studi ini. Sebagai lembaga non pemerintah, IGJ memiliki komitmen yang tinggi dan sangat peduli terhadap persoalan-persoalan bangsa saat ini. Wujud komitmen tersebut sangat terasa dari aktifitas-aktifitas yang dilakukan baik diskusi-diskusi yang berbobot, serta studi-studi yang dilakukan, di mana semuanya itu memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi bangsa dan Negara ini. Terakhir, kepada IPB sebagai institusi dimana kami mengabdikan, serta IPB Press yang berkenan menerbitkan buku ini, kami ucapkan terima kasih.

Penyusun

Arif Satria

Eva Anggraini

Akhmad Solihin

# Kata Pengantar

Di Indonesia sektor perikanan bisa dikatakan masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan pengembangan sektor pertanian, padahal perairan laut yang kita miliki lebih luas ketimbang daratan yang kita huni.

Ketertinggalan dalam bidang kelautan disebabkan banyak hal, misalnya saja sejak bertahun-tahun perhatian pemerintah pada kepentingan para pelaku perikanan amat minim, termasuk didalamnya nasib para nelayan yang semakin hari semakin termarjinalkan kehidupannya.

Penguasa orde baru yang saat itu kebetulan lahir dalam budaya Jawa yang lekat dengan kultur pertanian, tanpa disadari membawa arah pembangunan kita bertumpu pada sektor agraris. Dengan ditunjang oleh aparat pemerintah yang menyebar hingga ke pelosok desa, tujuan utama pencapaian swasembada beras dipacu keras dengan penerapan teknologi yang bertumpu pada revolusi hijau

Sayangnya revolusi hijau yang kemudian terbukti membawa berbagai dampak buruk pada keseimbangan ekologi, dilemanya justru tidak mampu membawa kesejahteraan masyarakat petaninya

Jika saja, sejak awal pemerintah kita dapat mengalokasikan perhatian kebijakan dan alokasi sumber pendanaan secara signifikan bagi masalah kemaritiman Indonesia, termasuk didalamnya dunia perikanan, maka boleh jadi saat ini kita sudah menepuk dada sebagai negara yang paling diperhitungkan di ASEAN karena sumber alam lautnya mampu menjadi salah satu sumber devisa terbesarnya

Sayangnya, eksplorasi masalah perikanan pada hal-hal diluar budidaya amatlah terbatas, tengok saja manajemen perikanan yang diajarkan dibanyak perguruan tinggi masih terbatas tentang bagaimana cara menangkap atau mengembangkan, mengolah, mengemas dan menjual produk-produk perikanan. Padahal ditengah-tengah kancah perdagangan global, manaje-

men perikanan tanpa didasari oleh informasi dan pengetahuan tentang arah politik perikanan dunia saat ini akan menjadikan pelakunya masuk dalam golongan kasta terendah dan menjadi budak negara lain di dunia perikanan.

Untuk inilah, maka kami mencoba untuk mengkaji masalah-masalah perikanan dari sudut pandang lain yaitu sebuah wacana politik perikanan yang tengah berkembang, serta tantangan bagi bangsa ini untuk memenangkannya.

Penjelasan data-data tentang politik dagang dalam dunia perikanan dan upaya pengelolaan sumberdaya ikan yang ada dalam studi ini, semakin menunjukkan para pemangku kepentingan (stakeholder) tidak memahami dan tidak bisa memanfaatkan sumberdaya perikanan yang berlimpah ruah demi kepentingan jangka panjang.

Studi ini merupakan wujud kesungguhan dari sebuah organisasi masyarakat sipil yang peduli pada masalah-masalah sektor perikanan, serta sebuah sumbangan bagi pembelajaran mahasiswa perikanan maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh pemetaan dan politik perdagangan perikanan yang saat ini berlaku global.

Semoga hasil studi ini memberikan manfaat dan membuka mata kita atas potret sektor perikanan di Indonesia, yang selama ini hanya dilirik dengan sebelah mata

Jakarta, April 2009

Indah Suksmaningsih  
Direktur Eksekutif  
Institute for Global Justice (IGJ)

IPB Press

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	xi
Bab 1	
Pendahuluan .....	1
Bab 2	
Globalisasi Produksi .....	5
Bab 3	
Globalisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan .....	31
Bab 4	
Globalisasi Perdagangan .....	65
Bab 5	
Penutup .....	117
Daftar Pustaka .....	123

# 1

## Pendahuluan

### Latar Belakang

Sebagai sebuah sistem, perikanan memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi bagi sebagian penduduk. Namun, meningkatnya populasi manusia terutama di wilayah pesisir dan laut serta kecanggihan teknologi membuat peluang terjadinya perubahan sistem alamiah dari lautan semakin besar. Perubahan tersebut dapat mengakibatkan berbagai hal negatif, baik pada sumberdaya yang terkandung maupun aspek fisik dari laut tersebut.

Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya ikan diperlukan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang, tidak hanya bagi generasi saat ini tapi juga bagi generasi masa depan. Dalam hal ini, pengelolaan yang bertanggung jawab menjadi salah satu kunci utama untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries development*).

FAO yang mengungkapkan bahwa total tangkapan perikanan laut dunia pada tahun 2005 tercatat sebesar 84,2 juta ton. Dengan berkaca pada tingginya tingkat pemanfaatan yang dikhawatirkan berujung pada krisis sumberdaya ikan,



maka pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab telah menjadi agenda bersama masyarakat internasional sebagai kunci utama untuk menjawab tantangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries development*). Hal ini dikarenakan jika kelestarian sumberdaya ikan di satu negara terganggu, hal ini akan mempengaruhi kondisi perikanan global dan dapat menyebabkan stok ikan di negara lain pun ikut terganggu, khususnya jenis-jenis ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory species*) dan jenis-jenis ikan yang bermigrasi terbatas (*straddling fish stock*) yang mempunyai kemampuan untuk melintasi batas-batas wilayah suatu negara (*transboundary*).

Dengan demikian, setiap anggota masyarakat internasional tidak selalu berurusan dengan kepentingan nasionalnya saja, tetapi juga berurusan dengan kepentingan bersama dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Inilah yang mendasari mengapa globalisasi perikanan terjadi.

#### Kerangka Analisis

Globalisasi produksi muncul akibat adanya anggapan bahwa produksi perikanan suatu negara tidak terlepas dari negara lain dan dunia internasional. Ketergantungan dengan dunia luar bisa dalam bentuk ketergantungan sarana produksi ataupun investasi. Sebagai gambaran, saat ini total produksi perikanan dunia mencapai 145 juta ton, yang masih didominasi perikanan tangkap (64 persen) dan budidaya (36 persen). Sumbangan negara sedang berkembang (NSB) terhadap total produksi dunia mencapai 80 persen, dan terhadap produksi budidaya lebih dari 90 persen. Bayangkan kontribusi Cina sendiri sudah mencapai 67 persen. Saat ini, globalisasi produksi mengalami krisis faktor produksi yang sama, salah satunya adalah bahan bakar minyak (BBM). Harga BBM yang mencapai lebih dari 140 USD/barel tentu memukul usaha perikanan tangkap. Pauly et.al memprediksi bahwa perikanan dunia telah mengkonsumsi 50 milyar liter bahan bakar atau 1,2 persen konsumsi dunia untuk menghasilkan 80 juta ton ikan. Jadi, untuk menangkap satu ekor ikan butuh 0,62 liter BBM. Rasio ikan/liter bahan bakar ini tentu lebih tinggi dari produksi protein hewani lainnya. Di Amerika Serikat, telah dihitung bahwa trawl butuh satu liter BBM/kilogram ikan,

sementara gillnet sepertiga liter/kilogram, dan purse seine 0,03 liter/kilogram (Lent, 2008). Dengan sendirinya trawl diprediksi akan semakin menurun. Di Vietnam, pangsa BBM terhadap biaya operasi penangkapan mencapai 52 persen (trawl), 40 persen (longline), 20 persen (purse seine). Di Indonesia juga kurang lebih sama. Tentu globalisasi produksi juga terkait dengan dengan globalisasi investasi dimana masuknya kapal dan industri perikanan asing seolah tak terelakkan. Bagaimana posisi Indonesia dalam globalisasi produksi seperti ini?

Sementara itu globalisasi pengelolaan sumberdaya juga mengemuka karena munculnya opini global yang menyatakan bahwa perikanan dunia dalam kondisi kritis, sehingga perlu pengelolaan bersama. Apabila tidak mau dituduh melakukan IUU (*illegal, unregulated, unreported*) Fishing, termasuk di dalamnya pencurian ikan dan tangkapan yang tidak dilaporkan, baik NSB maupun NM dituntut untuk tunduk pada aturan-aturan internasional tentang bagaimana mengelola sumberdaya agar tetap lestari. Nilai IUU fishing di dunia kini mencapai 15 milyar USD. FAO mencatat sekitar 30 persen hasil tangkapan ikan-ikan tertentu di dunia tergolong dalam IUU fishing (Spagnolli, 2008). Saat ini, 9 persen produk impor UE berasal dari IUU fishing. Karena itu, UE menerapkan *UE Catch Certification Scheme* yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar UE.

Selain itu, dalam globalisasi perikanan terjadi pula globalisasi perdagangan dan isu subsidi. Pada tahun 2007, ekspor produk perikanan dunia mencapai 93 milyar USD dan tumbuh sekitar 9 persen, sedangkan kontribusi NSB dan NM memiliki perbandingan yang sama. NSB menikmati penerimaan bersih sekitar 25 milyar USD dari ekspornya, sedangkan pasar dunia terbesar meliputi UE (42.7 persen), Jepang (15.6 persen), dan US (15.2 persen), yang totalnya mencapai 73 persen.

Perdagangan diprediksi terus meningkat seiring tren peningkatan konsumsi ikan/kapita, yang dalam kurun 30 tahun meningkat dari 11,5 kg/kapita/tahun menjadi 17 kg/kapita/tahun. Namun, saat ini Indonesia sudah ketinggalan dari Thailand dan Vietnam. Ekspor Thailand mencapai lebih dari 4 milyar USD, Vietnam 3,7 milyar USD (2007), dan kita baru sekitar 2,5 milyar USD. Disisi lain, UE, Jepang, dan Amerika

menjadi Rp 25.000,-, ikan marlin dari Rp 30.000,- menjadi Rp 20.000,- dan oilfish dari Rp 25.000,- sekarang tinggal Rp 12.000,-. Penurunan nilai ekspor ini membuat industri industri perikanan di Muara Baru mengalami penurunan margin yang sebelum krisis bisa mencapai 15 persen kini tinggal 5 persen.

Pergeseran pangsa pasar dari tiga besar Negara tujuan ekspor perikanan, yakni USA, UE, dan Jepang yang mengalami krisis cukup besar tidak menjadikan pengusaha perikanan di Muara Baru menjadi gentar hal ini dapat dibuktikan dengan terbukanya pasar - pasar lain. Dari catatan Forwarding PT. O bahwa masa krisis global ini mengakibatkan penurunan ekspor sebesar 20 hingga 30 persen. Kalau dikaitkan dengan angka penurunan ekspor ketiga negara tujuan ekspor utama yang mencapai 40 persen maka bisa ditarik kesimpulan bahwa ada terbuka pasar baru yang sudah mereka rintis, yakni PT. F yang mengalihkan ekspornya dari Thailand ke Tunisia, PT. T membuka pasarnya ke wilayah Timur Tengah khususnya ke Iran , PT. M mengekspor produknya ke Curacao di Karibia dan lain lain. Kreatifitas pada pelaku usaha perikanan di Muara Baru meski mendapat dukungan para pemangku di DKP dan para Konsul Jendral RI di seluruh belahan bumi untuk mempromosikan produk produk perikanan Indonesia kemasyarakat mancanegara agar tidak bergantung pada USA, UE dan Jepang. Penundaan peraturan pelarangan ekspor gelondongan harus diiringi dengan informasi pasar untuk produk - produk cakalang dalam bentuk *loin cooked* misalnya, promosi produk ini harus segera digalakkan kepada para pembeli diluar negeri dan bagi DKP juga mengalakkan sosialisasi produk ini keperusahaan-perusahaan agar pada saatnya nanti pelarangan diberlakukan tidak ada lagi perpanjangan kembali dengan demikian nilai tambah dari produk cakalang ini dapat dinikmati bangsa Indonesia.

# 5

## Penutup

Bab-bab terdahulu telah menggambarkan bahwa globalisasi perikanan, baik produksi, pengelolaan sumberdaya, maupun perdagangan, telah terjadi. Dari sisi produksi, produksi perikanan suatu negara sangat bergantung pada kondisi sumberdaya ikan dan energi global. Bencana produksi yang dialami NSB dan NM merupakan akibat dari globalisasi energi yang menjadikan BBM sebagai mainan para spekulasi internasional. Hal yang membedakan adalah adaptasinya terhadap faktor eksternal tersebut, yakni perikanan NSB lebih lambat dalam menyiasati dan akhirnya kolaps. Begitu pula dalam investasi, khususnya kapal asing, tempat NSB menjadi sasaran dari investor NM dan investor NSB lainnya yang memang menghendaki ekspansi produksi. Dalam hal ini Indonesia berada dalam posisi sebagai korban. Investasi asing dalam perikanan tangkap memang dapat meningkatkan pendapatan negara serta kesempatan kerja. Walaupun demikian, ternyata investasi asing, sebagai bentuk "legalisasi kapal asing", belum sepenuhnya menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan baik secara teknis maupun secara moral.

Sementara itu dalam globalisasi pengelolaan sumberdaya, bagi Indonesia, adanya gerakan anti IUU fishing bisa berkah atau bencana. Berkahnya adalah karena laut kita adalah obyek



pencurian ikan. Belum ada angka resmi kerugian kita, tapi tahun 2004, kerugian kita mencapai 1-4 milyar rupiah/kapal/tahun, dan ada sekitar 1000 kapal yang dapat dikategorikan IUU fishing, sehingga kerugian mencapai 1-4 triliun rupiah/tahun. Nah, bencananya adalah kini kita tak dapat lagi menangkap ikan di laut internasional secara bebas. Kita harus menjadi anggota RFMOs (*Regional Fisheries Management Organizations*) atau komisi pengelolaan perikanan regional apabila kita hendak menangkap ikan di wilayah tersebut. Seperti, untuk menangkap tuna di Samudera Hindia kita harus menjadi anggota IOTC (*Indian Tuna Commission*), juga CCSBT (*Convention of Conservation for Southern Bluefin Tuna*), dan di Pasifik kita harus menjadi anggota WCPFC (*Western Central Pacific Fisheries Commission*). Apabila Indonesia tidak menjadi anggota RFMOs tersebut maka akan dianggap ilegal, dan produk Indonesia akan diembargo di pasar internasional.

Embargo untuk tuna sirip biru Indonesia pernah berlaku di Jepang sejak tahun 2005 karena kita tidak menjadi anggota CCSBT. Padahal, *spawning ground* tuna tersebut ada di wilayah selatan Indonesia, yang seharusnya kita berhak atas tuna tersebut. Jepang, yang tidak memiliki akses langsung baik di perairan CCSBT maupun IOTC, ternyata dominan. Begitu pula dengan UE yang tidak memiliki akses langsung ke perairan WCPFC, juga kuat. Namun, kini kita sudah menjadi anggota kedua RFMO tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan dunia adalah masalah politik internasional, dan tidak hanya masalah teknis. Disinilah globalisasi pengelolaan sumberdaya menjadi tantangan bagi NSB.

Sementara itu globalisasi perdagangan bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. *Pertama*, memang NSB punya kesempatan untuk meraih keuntungan dari pasar NM yang makin terbuka. Namun, persoalannya bukan relasi antara NSB-NM, tetapi lebih pada NSB-NSB. Bayangkan apabila perdagangan bebas terjadi di ASEAN saja, maka sudah diduga pembudidaya ikan patin dan lele akan kolaps karena produk Vietnam yang lebih bersaing mengingat harga yang ditawarkan lebih murah. Ikan patin Vietnam seharga Rp 9000/kg, sementara patin lokal mencapai Rp 17 ribu/kg. *Kedua*, keuntungan ekspor NSB masih dinikmati

para eksportir atau pengusaha besar. Nelayan dan pembudidaya ikan kecil, sebagai pemasok bahan baku, akan tetap menikmati harga lokal. Misalnya, apakah pada saat ini, dengan bea-masuk nol persen ke Jepang membuat nelayan dan pembudidaya ikan juga menikmati kelebihan profit? *World Fish* (2008) menunjukkan bahwa di Afrika perdagangan perikanan tidak berhubungan dengan kenaikan pembangunan ekonomi dan manusia.

Sementara aturan tentang hambatan tarif dan non tarif pun perlu dicermati oleh Indonesia secara cermat. Indonesia harus tegas dalam menentukan target kebijakan, agar tindakan-tindakan Indonesia tidak menyimpang dari kepentingan nasional. Pada prinsipnya, sebagai NSB yang belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat, Indonesia harus tetap berorientasi untuk melindungi sektor perikanan serta produk-produk perikanan dalam negeri dari serbuan produk-produk impor. Dari segi penetapan tarif misalnya, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan tarif yang sangat longgar, di mana nilai tarif yang ditetapkan sangat rendah. Hal ini tentu saja akan menyulitkan Indonesia dalam membendung produk-produk impor. Tidak hanya itu, produk-produk domestik pun akan sangat terpukul karena daya saing yang masih rendah dibandingkan produk-produk dari negara lain seperti China, Thailand dan Vietnam.

Khusus hambatan non tarif, pada dasarnya Indonesia memiliki kemampuan dalam memenuhi standar mutu produk, jika mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah baik dalam investasi maupun transfer teknologi. Hingga saat ini, perikanan budidaya yang berkembang di Indonesia masih didominasi oleh usaha skala kecil yang memiliki kemampuan modal yang lemah serta teknologi yang terbatas.

Dalam isu subsidi perikanan, *Marine Resources Assessment Group* atau MRAG (2000) mengingatkan bahwa masalah overeksploitasi sumberdaya ikan di NSB ini bukan karena subsidi, tetapi karena lemahnya pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal yang sama juga diperlihatkan dari hasil riset beberapa ilmuwan Jepang di *World Fisheries Congress* lalu yang melihat subsidi tidak berkorelasi dengan kerusakan sumberdaya. Melihat besarnya masalah kemiskinan nelayan, maka subsidi secara langsung, seperti skim kredit khusus bagi nelayan, tentu masih

relevan. Hanya saja, memang subsidi tersebut masih harus disertai dengan skema fisheries management yang memadai.

Kebijakan subsidi perikanan ini masih sangat penting untuk diterapkan untuk mendorong kinerja sektor perikanan, baik dalam bentuk penyediaan sarana maupun prasarana, dengan subsidi bahan bakar terutama untuk perikanan artisanal. Dapat diakui bahwa Indonesia perlu mengurangi bentuk-bentuk subsidi yang langsung bersentuhan dengan industri perikanan. Pengurangan harus dilakukan secara bertahap, karena tanpa dukungan pemerintah yang kuat, sektor perikanan terutama perikanan laut lepas akan sulit untuk berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Eddy R. 1991. *Konvensi Hukum Laut 1982: Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal*. Bandung. Abardin.
- Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas 1993.*
- Agreement for the Implementation of the Provision of the UNCLOS of 19 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 1995.*
- Brown, Edward Duncan. 1994. *the International Law of the Sea: Volume I Introductory Manual*, England, Dartmouth.
- Candra, Adi. 2009. Politik Spawning Ground : dalam rangka penguatan posisi Indonesia pada CCSBT. Makalah kuliah (tidak dipublikasikan).
- Charlotte de Fontaubert and Indrani Lutchman. 2003. *Achieving Sustainable Fisheries: Implementing the New International Legal Regime, IUCN-The World Conservation Union*, Cambridge-UK, 2003.
- Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995.*
- FAO. 1996. *Technical Guidelines for Responsible Fisheries 3: Integration of Fisheries and Into Coastal Area Management*, Publishing Management Service Information Division, FAO, Roma.
- FAO. 2005. *Review of the State of World Marine Fishery Resources*, Publishing Management Service Information Division, FAO, Rome.
- FAO. 1997. *Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management)*, Divisi Publikasi FAO PBB, Roma.
- FAO. 2007. *the State of World Fisheries and Aquaculture 2006*, Information Division- Rome, FAO, 2007.



- IOTC. 2007. Report Of The Eleventh Session Of The Indian Ocean Tuna Commission. Grand Baie, Mauritius, 13-18 May 2007.
- IPOA for Management of Fishing Capacity
- IPOA for the Conservation and Management of Shark.
- IPOA for Reducing Incidental Catch of Seabird in Long-line Fisheries.
- IPOA for Illegal, Unreported and Regulated Fishing.
- Kuemlengan, Blaise. 2001. "Option for Implementation of Certain International and Regional Fisheries by Indonesia", makalah disampaikan pada *Indonesia National Conference on Fisheries Legislation*, yang diselenggarakan oleh DKP, Jawa Barat, Indonesia, 25-27 September 2001.
- Kusumaatmadja, M dan Ety R Agoes, Pengantar Hukum Internasional. Alumni. Bandung.
- Martosubroto, Purwito. 2005. "Implementing of the Code of Conduct for Responsible Fisheries in the Marine Fisheries Sector", *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Jakarta, Vol 2, Nomor 3, April 2005.
- Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, 2000.
- Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
- Tarafsofsky, Richard. 2007. Enhancing the Effectiveness of Regional Fisheries Management Organizations through Trade and Market Measures. Paper. Chatam House.
- Satria, Arif. 2002. Dampak IPOA-IUU Fishing terhadap Perikanan Indonesia. Makalah disampaikan pada Diskusi WWF Indonesia Wallacea Programe, Bali, 22 Mei 2002.

- Satria, Arif. 2005. Kenaikan BBM dan Subsidi Perikanan. Kompas, 2005.
- Sinaga, Sunggul. 2007. Presentasi Indonesia Participant and Membership in RFMO. Bena, Bali 2 November 2007.
- Sutisna, Dedi H. 2008. Nilai Strategis Sumberdaya Perikanan Tangkap bagi Pembangunan Nasional. Bahan presentasi yang disampaikan pada acara *Focus Group Discussion 'Illegal Fishing'*, UNPAD - Bandung, 10 Mei 2008
- Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
- Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
- Wahyuni, Mita, *et.al.*. 2007. *Program Gemar Makan Ikan: sebagai Strategi Membangun Anak Bangsa Berkualitas*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Xue, Gui Fang. 2004., *China's Response to International Fisheries Law and Policy: National Action and Regional Cooperation*, Dissertation, University of Wollongong, Australia, 2004.

## BIODATA PENULIS

**ARIF SATRIA:** Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB, peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB. Saat ini menjabat Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB. Penulis adalah doctor lulusan Kagoshima University dalam bidang *Marine Policy*. Email : arifsatria@gmail.com

**EVA ANGGRAINI:** Dosen Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB, dan meraih gelar Magister di Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK) IPB. Saat ini sedang menyelesaikan program S3 di Humbolt University Jerman. email : eva.anggraini@gmail.com

**AKHMAD SOLIHIN:** Dosen Fakultas Perikanan IPB, peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB, alumnus IPB dan menyelesaikan program Magister di bidang hukum laut, Universitas Padjajaran.

# Globalisasi Perikanan: Reposisi Indonesia?



Buku ini merupakan salah satu potret dari status globalisasi perikanan, baik produksi, pengelolaan sumberdaya, maupun perdagangan produk perikanan, serta implikasinya bagi dunia ketiga, khususnya Indonesia. Potret tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan, strategi advokasi, dan diplomasi internasional bagi pemerintah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sehingga tidak menjadi korban globalisasi.

Selain mencoba menjawab sebagian persoalan globalisasi perikanan, buku ini dapat menjadi awal yang baik untuk mulai memikirkan kembali posisi Indonesia dalam peta globalisasi perikanan dunia. Oleh karena itu, buku ini layak dibaca bagi masyarakat yang peduli terhadap isu perikanan dan kelautan.

Kerja Sama



Institute for Global Justice

ISBN : 978-979-493-180-6



9 789794 931806